

Analisis Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak Kota Kupang

Marlyn Davensca Katu¹, Alfred O. Ena Mau², Adriana R. Fallo³

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

E-mail: marlynkatu@gmail.com¹, allenamau@gmail.com², adrianafallo@icloud.com³

Article History:

Received: 26 Mei 2026

Revised: 30 Juli 2026

Accepted: 06 Agustus 2026

Keywords: Implementasi Kebijakan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 13 informan yang dipilih menggunakan teknik purposive dan snowball sampling. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BLT di Kelurahan Manutapen telah berjalan, namun belum mencapai efektivitas yang optimal. Pada aspek komunikasi, meskipun telah digunakan berbagai saluran informasi, masih terdapat keterbatasan dalam pemerataan akses informasi. Pada aspek sumber daya, aparatur memiliki kompetensi dan komitmen yang baik, tetapi dihadapkan pada keterbatasan jumlah tenaga dan minimnya dukungan anggaran operasional. Pada aspek disposisi, sikap aparatur yang mendukung menjadi faktor pendorong, meskipun masih ditemukan permasalahan ketidaktepatan sasaran. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi antar pelaksana telah berjalan, namun belum didukung oleh sinkronisasi data dan standar operasional prosedur yang memadai. Dengan demikian, implementasi BLT memerlukan penguatan pada sistem komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya, serta perbaikan tata kelola birokrasi guna mewujudkan pelaksanaan program yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan global yang bersifat kompleks,

multidimensional, dan terus menjadi tantangan utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara. Dalam perspektif pembangunan, kesejahteraan tidak semata-mata diukur dari aspek ekonomi, melainkan juga mencakup dimensi sosial seperti keadilan, kualitas hidup, serta akses terhadap layanan dasar, termasuk kesehatan dan pendidikan (Estede et al., 2025). Kemiskinan pada dasarnya merefleksikan kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural seperti ketimpangan distribusi pendapatan, keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (Setyawardani et al., 2020). Dalam merespons kondisi tersebut, berbagai negara mengembangkan kebijakan perlindungan sosial, salah satunya melalui program bantuan langsung tunai (BLT), yang dinilai efektif dalam memberikan intervensi cepat dan tepat sasaran kepada kelompok masyarakat rentan. Perkembangan teknologi informasi dan sistem keuangan digital turut memperkuat efektivitas implementasi program ini, sehingga BLT menjadi instrumen strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi (Firdaus & Husna, 2026; Sinaga et al., 2021; Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2024).

Dalam konteks nasional, Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan yang bersifat struktural dan berkelanjutan (Putra et al., 2023). Berbagai faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya tingkat upah, serta ketimpangan distribusi pendapatan menjadi determinan utama tingginya angka kemiskinan (Arifin, 2019). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai sekitar 28,51 juta jiwa atau sebesar 11,13% (BPS, 2016: 5). Sebagai upaya penanggulangan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis, di antaranya melalui Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang mencakup Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, dan Program Tabungan Keluarga Sejahtera (Agustanta et al., 2024; Taufiq, 2022). Selain itu, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mulai diperkenalkan pada tahun 2005 sebagai respons terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak, terus mengalami perkembangan baik dari segi bentuk maupun mekanisme implementasinya, sehingga menjadi salah satu instrumen utama dalam kebijakan perlindungan sosial di Indonesia.

Pada tataran lokal, implementasi program BLT di Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang menunjukkan dinamika yang tidak terlepas dari berbagai permasalahan empiris. Berdasarkan data Kelurahan Manutapen (2024), jumlah penerima bantuan mengalami perubahan sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Manutapen
Periode 2023–2024**

No		Tahun		Jumlah Penerima BLT Beras		Jumlah Penerima BLT Uang	
1	2023			36 KK		14 KK	
2	2024			70 KK		14 KK	

Sumber: Kelurahan Manutapen, 2024

Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan jumlah penerima BLT beras, sementara jumlah penerima BLT dalam bentuk uang tunai relatif stagnan. Kondisi ini mengindikasikan adanya dinamika kebutuhan dan distribusi bantuan di tingkat lokal. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, antara lain ketidaktepatan sasaran penerima, adanya penerima ganda, serta ketidakakuratan data penerima manfaat. Selain itu, kendala komunikasi berupa kurangnya transparansi informasi dan lemahnya koordinasi antar

pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung, serta kompleksitas prosedur birokrasi turut mempengaruhi efektivitas implementasi program. Pengalaman keterlambatan distribusi bantuan pasca bencana Siklon Tropis Seroja tahun 2021 semakin menegaskan adanya kelemahan dalam sistem penyaluran bantuan di tingkat lokal.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi program BLT memiliki implikasi yang beragam, baik dalam aspek efektivitas maupun tata kelola. Penelitian oleh Imron Rosidi (2022) menunjukkan bahwa implementasi BLT dapat berjalan relatif baik dari aspek koordinasi kelembagaan, namun belum mampu menyentuh akar permasalahan kemiskinan yang bersifat struktural. Sementara itu, Suari dan Giri (2021) mengidentifikasi adanya kelemahan dalam aspek transparansi dan pengawasan yang berpotensi menimbulkan praktik maladministrasi. Penelitian lain oleh Soni Apriani (2021) menemukan bahwa tata kelola dana desa, termasuk dalam penyaluran BLT, masih menghadapi kendala pada aspek akurasi data, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Secara konseptual, kajian literatur memiliki peran penting dalam membangun landasan teoretis dan empiris penelitian, serta membantu mengidentifikasi permasalahan yang belum terpecahkan (Ridwan et al., 2021).

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menempatkan implementasi BLT dalam kerangka analisis yang bersifat umum, baik dari perspektif tata kelola, transparansi, maupun potensi maladministrasi, tanpa secara spesifik mengkaji dimensi implementasi pada tingkat mikro, khususnya di level kelurahan. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi secara komprehensif dalam konteks lokal yang spesifik, seperti di Kelurahan Manutapen, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu memberikan analisis yang lebih kontekstual dan mendalam terhadap implementasi program BLT pada tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan menitikberatkan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi BLT, serta menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap kompleksitas interaksi sosial yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, khususnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pendekatan ini berupaya menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian secara kontekstual melalui deskripsi naratif. Adapun jenis penelitian studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada suatu fenomena tertentu dalam konteks yang spesifik, yaitu implementasi BLT di Kelurahan Manutapen. Studi kasus memungkinkan peneliti memahami perilaku dan dinamika sosial berdasarkan sudut pandang informan secara mendalam.

Lokasi penelitian ini ditetapkan di Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kelurahan Manutapen merupakan salah satu wilayah yang menerima program Bantuan Langsung Tunai serta memiliki dinamika permasalahan dalam implementasinya. Selain itu, lokasi ini dipilih karena adanya indikasi

persoalan seperti ketidaktepatan sasaran, keterlambatan penyaluran, serta kendala koordinasi antar pelaksana program, sehingga relevan untuk dikaji secara empiris dalam rangka memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan BLT di tingkat lokal.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling digunakan dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan snowball sampling digunakan untuk memperluas informasi melalui rekomendasi informan awal. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang, yang terdiri atas Lurah Manutapen, staf/pegawai kelurahan, Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat, masyarakat penerima manfaat BLT, serta masyarakat yang tidak menerima manfaat. Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang beragam dan representatif terkait implementasi program BLT dari berbagai perspektif.

Fokus penelitian ini diarahkan pada implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Manutapen. Penetapan fokus bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih terarah dan mendalam, serta menghindari meluasnya data yang tidak relevan. Adapun fokus penelitian meliputi empat aspek utama, yaitu: (1) komunikasi, yang mencakup metode komunikasi dan transparansi penyaluran BLT; (2) sumber daya, yang meliputi sumber daya manusia dan anggaran; (3) disposisi atau sikap, yang berkaitan dengan sikap pelaksana serta pelaksanaan tugas dan fungsi; dan (4) struktur birokrasi, yang mencakup koordinasi dan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan program BLT dan dinamika yang terjadi di lapangan, sehingga peneliti memperoleh data yang faktual dan kontekstual. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mendalam dari informan terkait pengalaman dan persepsi mereka terhadap implementasi program. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis seperti data penerima BLT dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, buku, dan dokumen ilmiah yang relevan guna memperkuat landasan teoretis penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Proses analisis meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan mengorganisasi data agar lebih terfokus dan relevan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif guna memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk memperoleh makna yang mendalam. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, serta melakukan pengecekan data pada waktu yang berbeda, sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak Kota Kupang

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Manutapen mulai dilaksanakan sejak tahun 2020 hingga penelitian ini dilakukan. Program ini merupakan bagian dari kebijakan

perlindungan sosial yang bertujuan untuk memberikan bantuan finansial secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya keluarga kurang mampu atau yang terdampak kondisi tertentu. Secara lebih spesifik, BLT diarahkan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat akibat tekanan seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, bencana alam seperti badai siklon tropis Seroja pada tahun 2021, serta pandemi COVID-19. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam situasi darurat, BLT berfungsi sebagai instrumen pemulihan sosial-ekonomi yang membantu masyarakat untuk lebih cepat pulih dari dampak krisis, sekaligus mendukung peningkatan daya beli masyarakat sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi lokal.

Berdasarkan data Kelurahan Manutapen (2024), pada tahun 2023 terdapat 36 kepala keluarga yang menerima bantuan dalam bentuk beras yang tersebar di berbagai RT dan RW di wilayah tersebut. Sementara itu, bantuan dalam bentuk uang tunai pada periode 2023 hingga 2024 diberikan kepada 14 orang penerima dengan jumlah yang bervariasi. Variasi tersebut terlihat dari nominal bantuan yang diterima, yaitu sebesar Rp225.000, Rp450.000, Rp600.000, Rp975.000, hingga Rp1.200.000. Perbedaan jumlah ini menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan jenis bantuan dan kondisi penerima manfaat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan nominal bantuan tersebut disebabkan oleh variasi jenis bantuan serta akumulasi periode pencairan. Nominal Rp225.000 mengindikasikan adanya bantuan parsial atau tambahan, sedangkan Rp600.000 merupakan standar bantuan untuk dua bulan dengan perhitungan Rp300.000 per bulan. Adapun nominal Rp975.000 menunjukkan kemungkinan adanya kombinasi beberapa jenis bantuan, sementara Rp1.200.000 mencerminkan akumulasi bantuan untuk beberapa bulan sekaligus atau adanya tambahan bantuan tertentu. Selain itu, perbedaan nominal juga dipengaruhi oleh periode pencairan yang tidak seragam, di mana sebagian penerima memperoleh bantuan secara bertahap setiap bulan, sedangkan sebagian lainnya menerima bantuan secara sekaligus untuk beberapa bulan, yaitu antara tiga hingga empat bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi BLT di Kelurahan Manutapen masih menghadapi variasi dalam mekanisme distribusi, baik dari segi waktu maupun besaran bantuan yang diterima.

Untuk menganalisis implementasi program BLT secara komprehensif, penelitian ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (1980), yang meliputi empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai efektivitas pelaksanaan program BLT di Kelurahan Manutapen serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam proses implementasinya.

Aspek Komunikasi dalam Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Manutapen

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Manutapen pada aspek komunikasi menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan telah memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi langsung melalui pertemuan warga dan rapat koordinasi dengan RT/RW, penggunaan media digital seperti grup WhatsApp, pemasangan informasi pada papan pengumuman, penyampaian melalui surat undangan, serta peran aktif Ketua RT/RW sebagai perantara informasi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Kelurahan, Heribertus Ferdinand Oetpah, SE, yang menyatakan bahwa komunikasi dilakukan melalui distribusi undangan, sosialisasi langsung, serta koordinasi dengan RT yang kemudian

menyampaikan informasi kepada masyarakat (hasil wawancara, 16 Januari 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa secara struktural, sistem komunikasi telah dirancang cukup beragam dan berlapis untuk menjangkau masyarakat secara luas.

Pertama, dari sisi metode komunikasi, penggunaan berbagai saluran komunikasi menunjukkan adanya upaya pemerintah kelurahan untuk memastikan informasi tersampaikan secara luas dan merata. Kombinasi komunikasi langsung dan tidak langsung menjadi strategi utama dalam menjangkau masyarakat dengan karakteristik yang beragam. Namun demikian, efektivitas metode ini belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam distribusi informasi. Hal ini terlihat dari pernyataan informan masyarakat penerima BLT, Ibu Doritia Koen, yang menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui jadwal penerimaan bantuan karena tidak memiliki akses terhadap informasi digital dan tidak aktif mengikuti pengumuman (hasil wawancara, 16 Januari 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan akses informasi yang berdampak pada ketidaktepatan waktu penerimaan informasi oleh masyarakat.

Kedua, dari aspek penyampaian pesan, komunikasi yang dilakukan pemerintah kelurahan masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan jangkauan dan efektivitas peran RT dalam menyampaikan informasi kepada seluruh warga. Tidak semua masyarakat aktif berinteraksi dengan RT atau memiliki akses terhadap media komunikasi yang digunakan, sehingga informasi tidak diterima secara merata. Selain itu, keterbatasan waktu dan kapasitas RT dalam menjangkau seluruh warga turut menjadi faktor penghambat dalam penyampaian informasi secara menyeluruh. Hal ini berdampak pada munculnya fenomena penumpukan warga saat pengambilan bantuan karena kurangnya informasi yang diterima secara tepat waktu.

Ketiga, dari sisi umpan balik (feedback), komunikasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala administratif seperti data penerima yang tidak sesuai dengan kondisi aktual, misalnya penerima yang sudah meninggal dunia namun masih terdaftar, atau penerima yang tidak berada di tempat saat penyaluran sehingga bantuan harus disimpan dan menumpuk di kantor kelurahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya bermasalah pada tahap penyampaian informasi, tetapi juga pada proses pembaruan data dan koordinasi antara pihak pelaksana dengan masyarakat.

Keempat, pada aspek transparansi penyaluran bantuan, ditemukan bahwa meskipun pemerintah kelurahan telah berupaya melakukan keterbukaan melalui sosialisasi dan publikasi data penerima, implementasinya masih menghadapi kendala serius. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ester Ndun selaku Kepala Seksi Pemerintahan, Ketertiban, dan Ketentraman Umum, masih terdapat penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, termasuk masyarakat dari kalangan menengah ke atas yang terdaftar melalui tautan pendaftaran online tanpa verifikasi awal yang ketat (hasil wawancara, 14 Januari 2025). Selain itu, ditemukan pula kasus penerima ganda, yaitu individu yang telah menerima bantuan lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan stunting, namun tetap menerima BLT. Temuan ini diperkuat oleh pernyataan informan non-penerima, Ibu Wehelmina Johana, yang mengungkapkan adanya pendobelan bantuan dalam masyarakat (hasil wawancara, 16 Januari 2025).

Kelima, dari sisi akurasi data, permasalahan utama terletak pada lemahnya proses verifikasi dan sinkronisasi data antar program bantuan. Ketidaktepatan sasaran menyebabkan bantuan tidak diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sekaligus memunculkan potensi kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Selain itu, kondisi ini juga berdampak pada menurunnya efektivitas program dalam menanggulangi kemiskinan, karena distribusi bantuan tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan kebijakan.

Tabel 1. Temuan Penelitian Aspek Komunikasi

No	Fokus	Temuan
1	Metode Komunikasi	Menggunakan sosialisasi langsung, RT/RW, WhatsApp, papan pengumuman, dan surat undangan
2	Akses Informasi	Tidak merata, sebagian masyarakat tidak memiliki akses teknologi
3	Penyampaian Informasi	Bergantung pada RT, namun belum menjangkau seluruh warga
4	Umpan Balik	Belum optimal, terlihat dari data penerima yang tidak terupdate
5	Transparansi	Masih terdapat penerima tidak tepat sasaran dan penerima ganda
6	Akurasi Data	Lemahnya verifikasi dan sinkronisasi data antar program bantuan

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa implementasi komunikasi dalam program BLT di Kelurahan Manutapen telah berjalan secara prosedural, namun belum mencapai efektivitas substantif. Secara teoritis, menurut Edward III (1980), komunikasi yang efektif dalam implementasi kebijakan harus memenuhi aspek kejelasan, konsistensi, dan penyampaian yang tepat sasaran. Dalam konteks penelitian ini, meskipun aspek kejelasan dan keberagaman saluran komunikasi telah terpenuhi, namun aspek konsistensi dan jangkauan informasi masih menjadi kendala utama. Kesenjangan akses informasi dan keterbatasan peran RT menunjukkan bahwa proses transmisi pesan belum sepenuhnya efektif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ni Made Kitty Putri Suari (2021) yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik dalam penyaluran BLT masih belum optimal, sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai mekanisme dan kriteria penerima. Selain itu, penelitian Soni Apriani (2021) juga menemukan bahwa kelemahan dalam aspek transparansi dan akurasi data menjadi kendala utama dalam tata kelola bantuan sosial di tingkat desa. Sementara itu, Imron Rosidi (2022) menegaskan bahwa meskipun komunikasi dan koordinasi dapat berjalan dengan baik, keterbatasan sumber daya dan sistem tetap mempengaruhi efektivitas implementasi program.

Dengan demikian, sintesis dari temuan dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam implementasi BLT tidak hanya terletak pada ketersediaan saluran komunikasi, tetapi lebih pada efektivitas distribusi informasi, akurasi data, serta integrasi sistem pendataan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pada sistem komunikasi yang lebih inklusif, peningkatan kapasitas aparat pelaksana, serta penguatan mekanisme verifikasi dan integrasi data agar implementasi program BLT dapat berjalan lebih efektif, adil, dan tepat sasaran.

Aspek Sumber Daya dalam Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Manutapen

Berdasarkan hasil penelitian, aspek sumber daya dalam implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Manutapen mencakup dua komponen utama, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial (anggaran operasional). Kedua komponen ini memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program, khususnya dalam memastikan ketepatan sasaran, kelancaran distribusi, serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat.

Pertama, dari sisi sumber daya manusia, pelaksanaan BLT di Kelurahan Manutapen didukung oleh sekitar 20–30 orang pelaksana yang terdiri dari kepala seksi, staf pelayanan, petugas lapangan, serta ketua RT sebagai perpanjangan tangan pemerintah kelurahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Paul Rame selaku bagian pelayanan masyarakat, secara umum SDM

yang terlibat dinilai telah memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensi, serta memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam proses pendataan, verifikasi, hingga distribusi bantuan (hasil wawancara, 17 Januari 2025). Selain itu, kemampuan pelaksana dalam memberikan pendampingan administratif kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang kurang melek digital, menjadi nilai positif dalam mendukung kelancaran program.

Kedua, meskipun secara umum SDM dinilai cukup kompeten, penelitian ini menemukan adanya keterbatasan dalam jumlah tenaga pendamping lapangan yang berdampak pada belum optimalnya proses verifikasi data secara menyeluruh. Keterbatasan ini menyebabkan masih adanya warga yang belum terdata secara akurat, baik yang seharusnya menerima bantuan namun belum terakomodasi, maupun sebaliknya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan masyarakat penerima BLT yang menyebutkan bahwa proses pelayanan berjalan dengan baik, namun terkadang terjadi antrean panjang akibat terbatasnya jumlah petugas (wawancara dengan Ibu Fita Fafu, 17 Januari 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa beban kerja yang tinggi tidak sepenuhnya diimbangi dengan jumlah SDM yang memadai.

Ketiga, dari sisi kualitas pelayanan, SDM pelaksana menunjukkan sikap responsif dan membantu masyarakat dalam proses administrasi. Informan menyatakan bahwa petugas mampu memberikan penjelasan secara jelas dan membantu dalam melengkapi persyaratan, bahkan bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan menggunakan teknologi digital (wawancara dengan Ibu Adolfinia Sora, 16 April 2025). Hal ini menunjukkan bahwa aspek kompetensi dan sikap pelayanan sudah berjalan dengan baik. Namun demikian, keterbatasan jumlah petugas tetap menjadi kendala yang memengaruhi efisiensi pelayanan, khususnya pada saat terjadi peningkatan volume masyarakat yang datang secara bersamaan.

Keempat, terkait sumber daya finansial, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk mendukung operasional penyaluran BLT di tingkat kelurahan. Seluruh proses, mulai dari pendataan hingga distribusi bantuan, dilaksanakan tanpa dukungan biaya operasional yang memadai. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ester Ndun selaku Kepala Seksi Pemerintahan, Ketertiban, dan Ketentraman Umum, yang menyatakan bahwa tidak ada biaya khusus dalam proses penyaluran BLT, meskipun bantuan yang diterima oleh masyarakat rata-rata sebesar Rp300.000 per bulan sesuai ketentuan pemerintah (hasil wawancara, 14 Januari 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dukungan anggaran di tingkat implementasi, yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program.

Kelima, ketiadaan anggaran operasional berdampak pada terbatasnya kemampuan kelurahan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program, seperti penambahan tenaga pendamping, pelaksanaan pelatihan bagi SDM, serta peningkatan fasilitas pendukung. Hal ini juga berimplikasi pada tingginya beban kerja aparatur kelurahan yang harus menjalankan tugas tambahan tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Meskipun demikian, pelaksana tetap menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan program agar bantuan dapat tersalurkan kepada masyarakat yang berhak.

Tabel 2. Temuan Penelitian Aspek Sumber Daya

No	Fokus	Temuan
1	Jumlah SDM	Sekitar 20–30 orang pelaksana, terdiri dari staf kelurahan dan RT
2	Kompetensi SDM	Memahami tugas, mampu mendampingi masyarakat, dan responsif
3	Keterbatasan SDM	Kurangnya tenaga lapangan untuk verifikasi dan pengawasan
4	Beban Kerja	Tinggi saat penyaluran, menyebabkan antrean dan pelayanan

		lambat
5	Anggaran Operasional	Tidak tersedia anggaran khusus untuk pelaksanaan BLT
6	Dampak Keterbatasan	Verifikasi tidak maksimal, pelayanan kurang efisien

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa aspek sumber daya dalam implementasi BLT di Kelurahan Manutapen belum sepenuhnya optimal, meskipun didukung oleh SDM yang kompeten dan memiliki komitmen tinggi. Dalam perspektif Edward III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun finansial. Dalam penelitian ini, aspek kompetensi SDM telah terpenuhi, namun aspek kuantitas SDM dan dukungan anggaran masih menjadi kendala utama. Keterbatasan tenaga lapangan menyebabkan proses verifikasi data tidak berjalan optimal, sementara ketiadaan anggaran operasional membatasi ruang gerak pelaksana dalam meningkatkan kualitas layanan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Soni Apriani (2021) yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan dana desa berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program bantuan sosial. Selain itu, Imron Rosidi (2022) juga menemukan bahwa keterbatasan kapasitas SDM menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas implementasi BLT di tingkat desa. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Ni Made Kitty Putri Suari (2021), yang menyatakan bahwa keterbatasan kewenangan dan sumber daya di tingkat lokal dapat mempengaruhi efektivitas distribusi bantuan.

Dengan demikian, sintesis temuan menunjukkan bahwa meskipun SDM di Kelurahan Manutapen memiliki kapasitas yang cukup baik, keterbatasan jumlah tenaga dan ketiadaan dukungan anggaran operasional menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi BLT. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya melalui penambahan tenaga pendamping, penyediaan anggaran operasional, serta peningkatan pelatihan bagi pelaksana agar program dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Aspek Disposisi atau Sikap Pelaksana dalam Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Manutapen

Berdasarkan hasil penelitian, aspek disposisi atau sikap dalam implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Manutapen menunjukkan kecenderungan yang positif dari aparatur pemerintah kelurahan. Sikap ini tercermin dari dukungan, komitmen, serta tanggung jawab aparatur dalam melaksanakan program sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Aparatur kelurahan memandang BLT sebagai instrumen penting dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, terutama bagi kelompok ekonomi lemah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu pegawai kelurahan yang menyatakan bahwa program BLT sangat membantu masyarakat, meskipun jumlah penerima masih terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh warga yang membutuhkan (hasil wawancara, 21 Januari 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa secara prinsip, sikap pemerintah kelurahan terhadap kebijakan BLT bersifat mendukung dan sejalan dengan tujuan program.

Pertama, dari sisi sikap pemerintah, aparatur kelurahan menunjukkan penerimaan yang kuat terhadap implementasi BLT sebagai kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BLT mampu meringankan beban ekonomi masyarakat, menjadi bentuk intervensi langsung pemerintah, serta membantu meningkatkan daya beli rumah tangga. Selain itu, aparatur juga memiliki kesadaran untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program, yang ditunjukkan melalui rencana penguatan seperti peningkatan verifikasi

data, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, peningkatan koordinasi dengan RT/RW, serta usulan penambahan tenaga pendamping dan pelatihan SDM. Sikap proaktif ini menunjukkan adanya orientasi pelayanan publik yang cukup baik dalam tubuh organisasi kelurahan.

Kedua, meskipun sikap aparatur cenderung positif, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat tantangan dalam aspek ketepatan sasaran bantuan. Aparatur kelurahan mengakui bahwa jumlah penerima yang terbatas serta keterbatasan kuota menyebabkan tidak semua masyarakat yang layak dapat terakomodasi. Di sisi lain, masih ditemukan ketidaksesuaian antara data penerima dengan kondisi riil di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sikap yang baik belum sepenuhnya diikuti oleh sistem yang mampu menjamin akurasi data. Dampaknya, muncul potensi ketidakpuasan masyarakat yang dapat berkembang menjadi kebisingan sosial, yaitu munculnya persepsi ketidakadilan dalam distribusi bantuan dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ketiga, dari aspek pelaksanaan tugas dan fungsi, aparatur kelurahan telah menjalankan perannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Proses pelaksanaan meliputi pendataan berbasis dokumen kependudukan, verifikasi kelayakan berdasarkan kondisi sosial ekonomi, koordinasi dengan RT/RW, distribusi bantuan sesuai jadwal, serta pelaporan dan dokumentasi kegiatan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Paul Rame yang menyatakan bahwa seluruh tahapan dilakukan sesuai prosedur, mulai dari pendataan hingga penyaluran bantuan dengan memastikan kelengkapan dokumen penerima (hasil wawancara, 17 Januari 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa dari sisi kepatuhan terhadap prosedur, aparatur telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Keempat, dari perspektif masyarakat, pelaksanaan tugas aparatur dinilai cukup jelas dan terarah, terutama dalam hal pemberian informasi terkait persyaratan administrasi dan mekanisme pengambilan bantuan. Informan penerima BLT menyatakan bahwa proses pengambilan bantuan berjalan dengan cukup tertib dan petugas memberikan arahan yang jelas (wawancara dengan Ibu Fita Fafu, 17 Januari 2025). Namun demikian, masyarakat juga mengungkapkan adanya ketidakpuasan dari sebagian warga yang merasa layak menerima bantuan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur telah dijalankan dengan baik, persepsi keadilan dalam distribusi bantuan masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.

Kelima, secara keseluruhan, disposisi atau sikap aparatur dalam implementasi BLT di Kelurahan Manutapen dapat dikategorikan baik, ditandai dengan adanya komitmen, responsivitas, dan kesediaan untuk menjalankan program sesuai aturan. Namun demikian, efektivitas sikap tersebut masih dibatasi oleh persoalan struktural, khususnya terkait akurasi data dan keterbatasan kuota penerima. Dengan demikian, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh sikap aparatur yang positif, tetapi juga oleh sistem pendukung yang mampu memastikan keadilan dan ketepatan sasaran program.

Tabel 3. Temuan Penelitian Aspek Disposisi atau Sikap

No	Fokus	Temuan
1	Sikap Pemerintah	Mendukung penuh program BLT dan menilai bermanfaat bagi masyarakat
2	Komitmen Pelaksana	Tinggi, ditunjukkan melalui upaya peningkatan kualitas pelaksanaan
3	Ketepatan Sasaran	Masih belum optimal, terdapat warga layak yang belum menerima
4	Pelaksanaan Tugas	Sesuai prosedur mulai dari pendataan hingga penyaluran
5	Persepsi	Umumnya positif, namun masih ada ketidakpuasan terkait keadilan

	Masyarakat	distribusi
6	Tantangan	Akurasi data dan keterbatasan kuota penerima

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa aspek disposisi dalam implementasi BLT di Kelurahan Manutapen telah menunjukkan kondisi yang relatif baik. Dalam perspektif Edward III (1980), disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, karena mencerminkan tingkat komitmen, kejujuran, dan responsivitas aparatur terhadap kebijakan yang dijalankan. Dalam penelitian ini, sikap aparatur yang mendukung dan proaktif telah menjadi faktor pendorong utama dalam pelaksanaan program. Namun demikian, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada kendala ketidaktepatan sasaran yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan sosial.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Imron Rosidi (2022) yang menyatakan bahwa implementasi BLT dapat berjalan baik dari sisi komitmen pelaksana, namun belum mampu mengatasi permasalahan struktural secara menyeluruh. Selain itu, Ni Made Kitty Putri Suari (2021) juga menemukan bahwa kelemahan dalam sistem pendataan dan pengawasan dapat menyebabkan ketidaktepatan sasaran, meskipun aparatur memiliki niat dan sikap yang baik. Sementara itu, Soni Apriani (2021) menegaskan bahwa kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh konsistensi antara sikap pelaksana dan sistem administrasi yang mendukung.

Dengan demikian, sintesis antara temuan penelitian dan kajian terdahulu menunjukkan bahwa disposisi atau sikap yang positif merupakan prasyarat penting, tetapi belum cukup untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan. Diperlukan penguatan sistem pendataan, peningkatan akurasi verifikasi, serta penyesuaian kuota penerima agar sikap aparatur yang sudah baik dapat menghasilkan output kebijakan yang lebih adil, tepat sasaran, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aspek Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Manutapen

Berdasarkan hasil penelitian, struktur birokrasi dalam implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Manutapen menunjukkan adanya kerangka kerja yang cukup terorganisir, terutama dalam hal koordinasi antar pelaksana dan pelaksanaan prosedur kerja. Struktur birokrasi ini melibatkan berbagai aktor, seperti aparat kelurahan, ketua RT/RW, serta instansi terkait seperti dinas sosial, yang secara bersama-sama berperan dalam memastikan kelancaran proses pendataan, verifikasi, hingga distribusi bantuan kepada masyarakat. Secara umum, struktur yang ada telah mampu mendukung pelaksanaan program, meskipun masih ditemukan beberapa kendala dalam praktiknya.

Pertama, dari aspek koordinasi, pelaksanaan BLT di Kelurahan Manutapen menunjukkan adanya kerja sama yang cukup baik antara pemerintah kelurahan dan perangkat wilayah, khususnya RT/RW. Koordinasi ini dilakukan dalam berbagai tahapan, mulai dari pendataan dan verifikasi calon penerima, penyampaian informasi kepada masyarakat, pendampingan saat penyaluran bantuan, hingga penanganan pengaduan warga. Sekretaris kelurahan menyatakan bahwa proses verifikasi dilakukan melalui musyawarah kelurahan dengan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan (hasil wawancara, 16 Januari 2025). Selain itu, RT berperan sebagai penghubung utama antara pemerintah dan masyarakat karena memiliki kedekatan langsung dengan kondisi sosial ekonomi warga. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural, jalur koordinasi telah terbentuk dan berfungsi dalam mendukung implementasi program.

Kedua, meskipun koordinasi telah berjalan, penelitian ini menemukan adanya kendala dalam

sinkronisasi data dan kecepatan penyampaian informasi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa data penerima tidak selalu sesuai dengan kondisi aktual di lapangan, sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat yang merasa layak tetapi tidak terdaftar. Selain itu, keterlambatan penyampaian informasi melalui RT/RW menyebabkan sebagian warga tidak mengetahui jadwal penyaluran secara tepat waktu. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan penerima BLT yang menyatakan bahwa koordinasi sudah cukup baik, namun informasi terkadang terlambat diterima oleh masyarakat (wawancara dengan Bapak Joni Santoso, 16 Februari 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi yang ada belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam hal ketepatan waktu dan akurasi informasi.

Ketiga, dari sisi dampak koordinasi, meskipun program tetap dapat berjalan dan sebagian besar masyarakat merasakan manfaatnya, kelemahan dalam koordinasi berdampak pada munculnya ketidakefisienan, seperti keterlambatan penyaluran, ketidaktepatan sasaran, serta potensi ketidakpuasan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa koordinasi yang belum optimal dapat mempengaruhi kualitas implementasi kebijakan secara keseluruhan, meskipun struktur birokrasi secara formal telah terbentuk.

Keempat, terkait Standar Operasional Prosedur (SOP), hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT di Kelurahan Manutapen pada dasarnya telah mengacu pada pedoman teknis dari pemerintah pusat, seperti tahapan pendataan, verifikasi, validasi, sosialisasi, penyaluran, serta pelaporan. Namun demikian, belum terdapat SOP tertulis yang disusun secara spesifik di tingkat kelurahan. Ketidadaan SOP lokal ini berpotensi menyebabkan variasi dalam pelaksanaan di lapangan, baik dalam hal prosedur kerja maupun pengambilan keputusan. Bapak Paul Rame menyatakan bahwa meskipun pelaksanaan telah mengikuti prosedur yang ada, kendala sering muncul terutama dalam sinkronisasi data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta keterbatasan waktu dan sumber daya dalam proses verifikasi (hasil wawancara, 3 Februari 2025).

Kelima, dalam praktik pelaksanaan, tahapan prosedur tetap dijalankan secara sistematis, mulai dari pendataan oleh RT/RW, verifikasi oleh kelurahan, validasi oleh dinas sosial, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat dengan persyaratan administrasi tertentu. Selain itu, tersedia mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang merasa tidak terakomodasi dalam program, serta pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan tantangan, seperti protes dari masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima serta perlunya percepatan koordinasi dalam menangani pengaduan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua RT yang menyatakan bahwa masih terdapat warga yang tidak memahami kriteria penerima dan merasa tidak puas terhadap hasil pendataan (hasil wawancara, 15 Februari 2025).

Keenam, dari perspektif masyarakat, program BLT dinilai memberikan manfaat nyata dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar, meskipun terdapat catatan terkait aspek teknis pelaksanaan, seperti antrean panjang saat penyaluran dan ketidaktepatan sasaran. Informan penerima BLT menyampaikan bahwa bantuan sangat membantu, namun diharapkan adanya perbaikan dalam pengaturan jadwal dan penentuan penerima agar lebih tepat dan adil (hasil wawancara, 15 Februari 2025). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari kualitas tata kelola birokrasi yang mendukungnya.

Tabel 4. Temuan Penelitian Aspek Struktur Birokrasi

No	Fokus	Temuan
1	Koordinasi	Berjalan cukup baik melalui kelurahan, RT/RW, dan instansi terkait
2	Peran RT/RW	Menjadi penghubung utama dalam pendataan, informasi, dan pengawasan
3	Kendala Koordinasi	Data tidak sinkron, informasi terlambat, keterbatasan waktu dan sumber daya
4	SOP	Mengacu pada pedoman pusat, namun belum ada SOP tertulis di tingkat kelurahan
5	Pelaksanaan Prosedur	Berjalan sistematis dari pendataan hingga pelaporan
6	Dampak	Masih terdapat ketidaktepatan sasaran, antrean, dan keluhan masyarakat

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa struktur birokrasi dalam implementasi BLT di Kelurahan Manutapen telah terbentuk secara formal dan fungsional, namun belum sepenuhnya optimal dalam praktiknya. Dalam perspektif Edward III (1980), struktur birokrasi yang efektif ditandai dengan adanya prosedur yang jelas serta koordinasi yang terintegrasi antar pelaksana. Dalam penelitian ini, aspek koordinasi telah berjalan, tetapi masih menghadapi kendala dalam sinkronisasi data dan distribusi informasi. Selain itu, ketiadaan SOP tertulis di tingkat lokal menunjukkan adanya kelemahan dalam standardisasi pelaksanaan, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam implementasi kebijakan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Soni Apriani (2021) yang menyatakan bahwa kelemahan dalam tata kelola dan prosedur administrasi dapat mempengaruhi kualitas implementasi program bantuan sosial. Selain itu, Ni Made Kitty Putri Suari (2021) juga menegaskan bahwa kurangnya kejelasan mekanisme pengawasan dan prosedur operasional dapat membuka peluang terjadinya ketidaktepatan sasaran. Sementara itu, Imron Rosidi (2022) menunjukkan bahwa koordinasi yang baik perlu didukung oleh sistem administrasi yang kuat agar implementasi kebijakan berjalan efektif.

Dengan demikian, sintesis temuan menunjukkan bahwa meskipun struktur birokrasi di Kelurahan Manutapen telah mampu menjalankan fungsi dasarnya, masih diperlukan penguatan pada aspek koordinasi, sinkronisasi data, serta penyusunan SOP yang lebih sistematis di tingkat lokal. Hal ini penting agar implementasi BLT dapat berjalan lebih terstandar, efisien, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak Kota Kupang menunjukkan bahwa secara umum program telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Pada aspek komunikasi, pemerintah kelurahan telah menggunakan berbagai saluran informasi, seperti RT/RW, media sosial, dan pengumuman langsung, tetapi efektivitasnya masih terbatas akibat kesenjangan akses informasi dan keterlambatan penyampaian. Pada aspek sumber daya, meskipun aparat memiliki kompetensi dan komitmen yang baik, keterbatasan jumlah tenaga lapangan dan tidak adanya anggaran operasional menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Pada aspek disposisi, sikap aparat yang positif dan mendukung menjadi faktor pendorong keberhasilan, namun masih dihadapkan pada persoalan ketidaktepatan sasaran. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi antar pelaksana telah berjalan, tetapi belum optimal akibat lemahnya sinkronisasi data serta belum

adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis di tingkat kelurahan. Dengan demikian, keempat aspek implementasi menurut Edward III menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan prosedural dan efektivitas substantif di lapangan.

Implikasi dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya program dan dukungan aparatur, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas sistem pendukung yang meliputi komunikasi yang inklusif, kecukupan sumber daya, integritas data, serta kejelasan prosedur birokrasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat integrasi data penerima bantuan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, menyediakan dukungan anggaran operasional, serta menyusun SOP yang lebih sistematis dan kontekstual di tingkat kelurahan. Selain itu, diperlukan inovasi dalam sistem komunikasi publik yang lebih adaptif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar informasi dapat diterima secara merata. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu lokasi, yaitu Kelurahan Manutapen, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda. Kedua, keterbatasan waktu dan sumber daya penelitian menyebabkan jumlah informan dan kedalaman eksplorasi data masih terbatas, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan seluruh dinamika implementasi program. Ketiga, penelitian ini lebih berfokus pada perspektif implementasi kebijakan, sehingga belum mengkaji secara mendalam dampak jangka panjang program BLT terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, menambah jumlah informan, serta mengintegrasikan pendekatan evaluatif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Agustanta, N., Dewi Anggalini, T., Septiningrum, L., & Dewanti, P. (2024). Assessing the Effectiveness of Social Assistance Programs to Alleviating Poverty in Indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i7.15526>
- Apriani, S. (2021). *Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid19 di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, DIY*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD."
- Arifin. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINANDI INDONESIA. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1(2), 1–8. <https://doi.org/10.36917/japabis.v1i2.9>
- Estede, S., Hanum, N., Apriyanto, Iskandar, Miswar, Rizal, Y., Azizah, S., Hermawati, I., & Maika Saputra, H. (2025). *KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN*.
- Firdaus, M. R., & Husna, S. A. (2026). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Pasirtangkil Kecamatan Warunggunung. *Jurnal Cendekia Hukum Indonesia*, 2(1), 343–351. <https://doi.org/10.71417/jchi.v2i1.132>
- Putra, T. W. A., Solikhin, S., & Abdillah, M. Z. (2023). Model Hybrid untuk Prediksi Jumlah Penduduk yang Hidup dalam Kemiskinan. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 10(6), 1253–1264. <https://doi.org/10.25126/jtiik.1067484>
- Ridwan, M., Am, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Rosidi, I. (2022). *Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Suwangi Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Di Masa*

-
- Pandemi Covid 19* [Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah].
<https://repository.ummat.ac.id/5033/>
- Setyawardani, D. T. R., Paat, C. J., & Lesawengen, L. (2020). Dampak Bantuan Pkh Terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado. *Holistik, Journal of Social and Culture*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/holistik/article/view/29324>
- Sinaga, A. S. R., Marbun, M., & Sitio, A. S. (2021). Penerapan Teknologi Informasi Penentuan Prioritas Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa Pagar Jati. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 4(1), 65–70.
<https://doi.org/10.33330/jurdimas.v4i1.681>
- Suari, N. M. K. P., & Giri, N. P. N. S. (2021). Analisis Terhadap Potensi Maladministrasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Selama Pandemi Covid-19. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 9(2).
- Taufiq, N. (2022). Penciri Kemiskinan Ekstrem di 35 Kabupaten Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2022(1), 895–904.
<https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1258>
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2024). *Optimising Village Direct Cash Transfers: (BLT Desa) as a Strategic Instrument for Social Protection and Village Economic Empowerment* (0 ed.). Australia-Indonesia Partnership for Poverty Alleviation.
<https://doi.org/10.65425/640925>